

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

KECAMATAN LARANGAN

KABUPATEN PAMEKASAN

TAHUN 2020



KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Larangan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2020. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-2 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Larangan Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Larangan Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Larangan. Kinerja Kecamatan Larangan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Larangan Tahun 2020.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Larangan Tahun 2020 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh

jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Larangan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kecamatan Larangan secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pamekasan, 28 Februari 2021



CAMAT LARANGAN

Drs. AGUS BUDI SANTOSO, M.Si

NIP. 19720913 199302 1 002

Pembina Tingkat I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	4
D. Landasan Hukum	5
E. Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2020.....	13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	24
B. Realisasi Anggaran	34
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	36
BAB IV PENUTUP	42
LAMPIRAN	44
I. SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	44
II. MATRIKS RENSTRA.....	48
III. SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	57
IV. PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Larangan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi pemerintah daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-

undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas: melaksanakan dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat desa serta tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Larangan mempunyai fungsi :

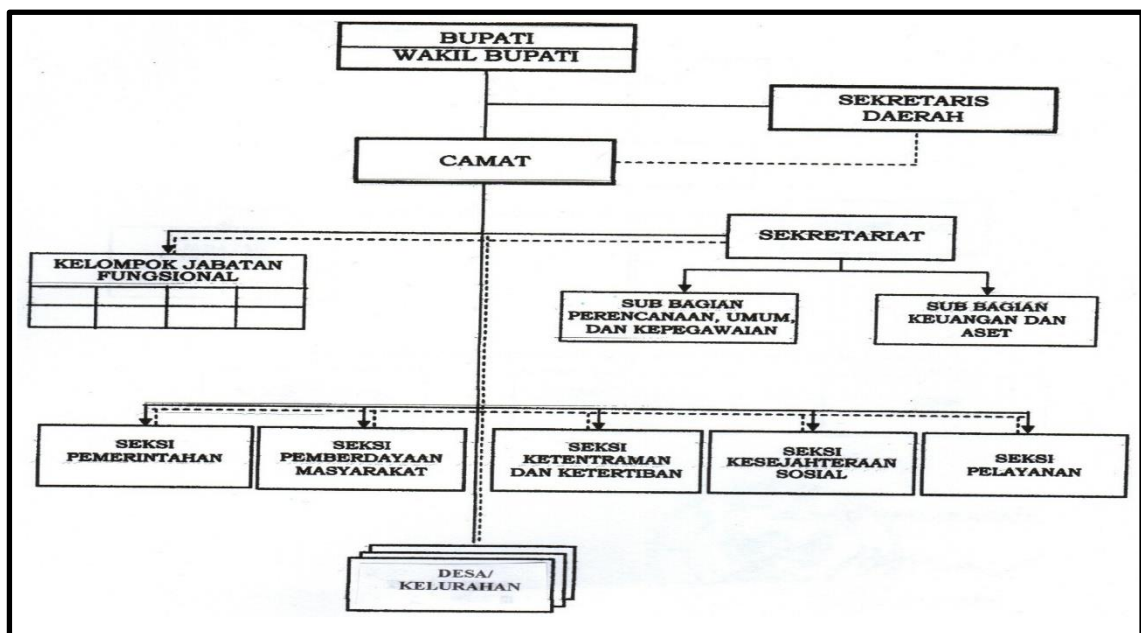
- penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- pengoordinasian upaya penyelenggaran ketenteraman dan ketertiban umum;
- pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

- o pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah di kecamatan;
- o pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
- o pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Perangkat Kecamatan, yang terdiri dari Sekretaris, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi



Sumber: Perbup Pamekasan No.74 Tahun 2016

Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program, perlengkapan dan aset, keuangan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, perpustakaan dan kearsipan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan kecamatan. Dalam hal ini pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretariat dibantu oleh 2 (dua)

Sub Bagian, yakni Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Perangkat Kecamatan lainnya adalah Seksi. Seksi yang ada di Kecamatan Larangan meliputi Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pelayanan. Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan Larangan tidak ada.

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Larangan periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa.;
2. Penatausahaan dan pengelolaan keuangan desa;
3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
4. Pelayanan public di tingkat kecamatan dan desa;
5. Manajemen data dan informasi bidang kesejahteraan sosial;
6. Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
7. Pelanggaran terhadap ketenteraman dan ketertiban umum.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2020 mengacu pada Renstra Kecamatan Larangan periode 2018-2023, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2020 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*);
2. Penguatan kemandirian desa melalui peningkatan tatakelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Larangan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
7. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Rencana Strategis Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023 . Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)

tahun. Didalam Renja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Pamekasan dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Pamekasan sebagai Kabupaten yang BAJRA RAJJA tor PARJUGHA.

Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah:

**Pamekasan Sejahtera Dari Bawah, Merata Dan Berkelanjutan
Berdasarkan Nilai-Nilai Agama**

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Penguatan kualitas sumber daya manusia.
2. Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya.
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
4. Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan
5. Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Larangan mengacu pada Misi ke-3, yaitu : **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.**

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 sebanyak 1 tujuan dan 2 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,51	3,76	4,02	4,26	4,51
		1.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Public yang Efektif dan Akuntabel	81 (A)	81 (A)	85 (A)	85 (A)	85 (A)

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		1.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	83	85	87	90

Sumber : Renstra Kecamatan Larangan periode 2018-2023

3. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan																																
				Alasan	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data																														
1.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	Permenpan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Range Nilai : <table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr><tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr></table> Nilai F01+F02+F03 ----- x Bobot per indikator 3 - Nilai per aspek = ΣNilai per indikator - Nilai Indeks = Σ(nilai aspek_n x bobot aspek_n)	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima	Laporan Hasil Pengukuran IPP di Kabupaten Pamekasan
Range Nilai	Kategori	Makna																																		
0 – 1,00	F	Gagal																																		
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																																		
1,51 – 2,00	D	Buruk																																		
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)																																		
2,51 – 3,00	C	Cukup																																		
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)																																		
3,51 – 4,00	B	Baik																																		
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik																																		
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																																		

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan setiap tahunnya 1. AA >90 -100 Sangat Memuaskan; 2. A >80 – 90 Memuaskan; 3. BB >70 – 80 Sangat Baik; 4. B >60 – 70 Baik; 5. CC >50 – 60 Cukup (Memadai); 6. C >30 - 50 Kurang; 7. D 0 - 30 Sangat Kurang.	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
1.2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (IKM)	Nilai	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Berdasarkan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK), MUTU PELAYANAN, dan KINERJA UNIT PELAYANAN sebagai berikut : 1. 25,00 – 64,99 D (Tidak baik); 2. 65,00 – 76,60 C (Kurang baik); 3. 76,61 – 88,30 B (Baik); 4. 88,31 – 100,00 A (Sangat baik). - Total Nilai Persepsi Per Unsur - ----- x Nilai perimbang - Total Unsur yang Terisi IKM Unit Pelayanan x 25	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Larangan Tahun 2020

B. Rencana Kinerja Tahun 2020

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2020 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Larangan Tahun 2020 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2020
Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3,76
		1.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Public yang Efektif dan Akuntabel	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	Nilai	81 (A)
		1.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tahun 2020

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang

diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020. Pada tanggal 15 bulan Pebruari tahun 2020 ditetapkan Perjanjian Kinerja. Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3,76
1.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Public yang Efektif dan Akuntabel	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	Nilai	81 (A)
1.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Larangan Tahun 2020

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 15 bulan April tahun 2020 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dikarenakan terjadi pergantian atau mutasi jabatan, akan tetapi tidak ada perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran kinerja, dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.5

**Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
Tahun 2020**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3,76
1.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Public yang Efektif dan Akuntabel	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	Nilai	81 (A)
1.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Larangan Tahun 2020

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Larangan :

Tabel 2.6

Program dan Kegiatan Kecamatan Larangan Tahun 2020

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Prosentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik	83	102.000.000
1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terakomodir	12	10.000.000
2	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan administrasi Perkantoran yang terakomodir	7	92.000.000
II	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	• Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	82	67.900.000
		• Prosentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	82	10.500.000
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1	11.000.000
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1	16.500.000
5	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	5	18.900.000
6	Pengadaan meubeleurnya	Jumlah meubeleurnya yang diadakan	8	10.500.000
7	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diadakan	2	21.000.000
8	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	6	10.500.000
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	1	11.000.000
III	Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	• Prosentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	82	22.000.000

		• Nilai Sakip	A	
10	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah dokumen sakip yang disusun dengan kualitas baik	5	11.000.000
11	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dengan baik	1	11.000.000
IV	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum	• Prosentase Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan, dan Pengelolaan Keuangan Desa	90	34.375.000
		• Prosentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Dibina	75	78.150.000
		• Prosentase Hasil Koordinasi Bidang Keterntraman, Ketertiban Umum, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Yang Ditindaklanjuti	75	227.475.000
12	Pembinaan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Jumlah desa melaksanakan Musrenbang sesuai administrasi	1	14.375.000
13	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desanya	14	20.000.000
14	Fasilitas pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah organisasi perempuan dan PKK yang terfasilitasi	14	15.750.000
15	Fasilitas peningkatan kualitas kelestarian lingkungan di wilayah kecamatan	Jumlah wilayah yang terfasilitasi	14	13.125.000
16	Fasilitasi kepemudaan dan olahraga	Jumlah kegiatan kepemudaan dan olahraga yang terfasilitasi	14	18.900.000
17	Koordinasi penguatan sistem pemerintahan dan pembangunan di kecamatan	Jumlah koordinasi penguatan sistem pemerintahan dan pembangunan	4	13.100.000
18	Koordinasi dan Operasional Peringatan Hari	Jumlah peserta peringatan hari besar keagamaan dan nasional	6	50.000.000

	Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional			
19	Optimalisasi Pemungutan PBB	Jumlah desa yang dioptimalisasi pemungutan PBB	14	26.250.000
20	Pembinaan Posyandu	Jumlah posyandu yang dibina	71	21.000.000
21	Fasilitasi Penanganan Kelancaran Arus Lalu Lintas Pasar	jumlah pasar yang terfasilitasi	2	15.000.000
22	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme perangkat desa	Jumlah perangkat desa yang mengikuti peningkatan kapasitas dan profesionalisme	42	12.500.000
23	Penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah penanganan pengaduan masyarakat yang terselesaikan	4	10.000.000
24	Pelaksanaan Forum Serap Aspirasi/Silaturahmi Kepala Daerah bersama Ulama/Tokoh dan Masyarakat	Jumlah peserta forum rekonsiliasi/konsolidasi/silaturahmi yang dilaksanakan	500	100.000.000
25	Pembinaan Remaja Masjid	Jumlah organisasi remaja masjid yang dibina	14	10.000.000
26	Pelaksanaan Istighosah/Pengajian Bersama Masyarakat	Jumlah Istighosah/pengajian bersama masyarakat yang dilaksanakan	1	49.500.000
V	Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	• Prosentase pelayanan kecamatan yang sesuai SOP	87	23.100.000
27	Pengembangan dan Operasionalisasi Aplikasi Pelayanan Masyarakat	Jumlah Aplikasi Pelayanan Terpadu yang dikembangkan	1	13.100.000
28	Survey kepuasan masyarakat	Jumlah survey kepuasan masyarakat yang dilaksnakan	2	10.000.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Larangan Tahun 2020

Pada tanggal 25 bulan April tahun 2020 dilaksanakan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 dikarenakan adanya pandemic COVID-19 sehingga perlu diadakan refocusing serta perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran).

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7

Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Larangan Tahun 2020

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Prosentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik	83	114.677.200
1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terakomodir	12	11.320.000
2	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan administrasi Perkantoran yang terakomodir	7	103.357.200
II	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	• Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	82	61.306.547
		• Prosentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	82	14.860.000
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1	5.114.500
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1	17.188.747
5	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	5	25.300.000
6	Pengadaan meubeleurnya	Jumlah meubeleurnya yang diadakan	8	7.837.500
7	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diadakan	2	-
8	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	6	14.860.000
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	1	5.865.800
III	Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	• Prosentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	82	7.345.000
		• Nilai Sakip	A	

10	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah dokumen saki yang disusun dengan kualitas baik	5	2.050.000
11	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dengan baik	1	5.295.000
IV	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum	• Prosentase Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan, dan Pengelolaan Keuangan Desa	90	24.505.000
		• Prosentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Dibina	75	33.836.400
		• Prosentase Hasil Koordinasi Bidang Ketertraman, Ketertiban Umum, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Yang Ditindaklanjuti	75	95.745.000
12	Pembinaan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Jumlah desa melaksanakan Musrembang sesuai administrasi	1	14.375.000
13	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desanya	14	10.130.000
14	Fasilitas pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah organisasi perempuan dan PKK yang terfasilitasi	14	15.196.400
15	Fasilitas peningkatan kualitas kelestarian lingkungan di wilayah kecamatan	Jumlah wilayah yang terfasilitasi	14	4.188.000
16	Fasilitasi kepemudaan dan olahraga	Jumlah kegiatan kepemudaan dan olahraga yang terfasilitasi	14	4.550.000
17	Koordinasi penguatan sistem pemerintahan dan pembangunan di kecamatan	Jumlah koordinasi penguatan sistem pemerintahan dan pembangunan	4	4.210.000
18	Koordinasi dan Operasional Peringatan Hari Besar Keagamaan	Jumlah peserta peringatan hari besar keagamaan dan nasional	6	1.725.000

	dan Hari Besar Nasional			
19	Optimalisasi Pemungutan PBB	Jumlah desa yang dioptimalisasi pemungutan PBB	14	6.488.000
20	Pembinaan Posyandu	Jumlah posyandu yang dibina	71	6.735.000
21	Fasilitas Penanganan Kelancaran Arus Lalu Lintas Pasar	jumlah pasar yang terfasilitasi	2	4.885.000
22	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme perangkat desa	Jumlah perangkat desa yang mengikuti peningkatan kapasitas dan profesionalisme	42	4.120.000
23	Penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah penanganan pengaduan masyarakat yang terselesaikan	4	3.215.000
24	Pelaksanaan Forum Serap Aspirasi/Silaturahmi Kepala Daerah bersama Ulama/Tokoh dan Masyarakat	Jumlah peserta forum rekonsiliasi/konsolidasi/silaturahmi yang dilaksanakan	500	71.034.000
25	Pembinaan Remaja Masjid	Jumlah organisasi remaja masjid yang dibina	14	3.235.000
26	Pelaksanaan Istighosah/Pengajian Bersama Masyarakat	Jumlah Istighosah/pengajian bersama masyarakat yang dilaksanakan	1	-
V	Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	• Prosentase pelayanan kecamatan yang sesuai SOP	87	7.262.000
27	Pengembangan dan Operasionalisasi Aplikasi Pelayanan Masyarakat	Jumlah Aplikasi Pelayanan Terpadu yang dikembangkan	1	4.020.000
28	Survey kepuasan masyarakat	Jumlah survey kepuasan masyarakat yang dilaksnakan	2	3.242.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Larangan Tahun 2020 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian

tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Larangan Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Larangan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Larangan Tahun 2020

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,76	n/a	n/a	n/a	Laporan Hasil Pengukuran IPP Kabupaten Pamekasan
1.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Public yang Efektif dan Akuntabel	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	81 (A)	78,18 (BB)	97%	Cukup	LHE SAKIP Tahun 2020
1.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	88	106%	Sangat Baik	Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2020

Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 3,76 dengan realisasi kinerja dan capaian kinerja belum teridentifikasi dikarenakan belum adanya system penghitungan yang terintegrasi terkait indeks pelayanan public.

Nilai Evaluasi SAKIP pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 81 (A), dengan realisasi kinerja 78,18 (BB) dan capaian kinerja sebesar 97% atau kategori cukup. Target kinerja tersebut tidak tercapai disebabkan karena adanya reviu dokumen perencanaan sehingga penyajian informasi kinerja kurang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public kecamatan pada tahun 2020 ditargetkan 83 dengan realisasi sebesar 88 dan capaian kinerja sebesar 106% atau katagori sangat baik. Pencapaian target kinerja tersebut dapat tercapai berkat dukungan kinerja aparatur kecamatan dan dukungan masyarakat di wilayah kecamatan. Namun demikian terdapat faktor penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut, yaitu belum tersedianya kebijakan atau regulasi yang mengatur reward dan punishment terhadap aparatur yang bertugas pada unit pelayanan public yang ada di pemerintah kabupaten Pamekasan.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2019 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No .	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,51	n/a	n/a	3,76	n/a	n/a
1.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Public yang Efektif dan Akuntabel	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	81 (A)	68,93 (B)	85,1%	81 (A)	78,18 (BB)	97%
1.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	87	108%	83	88	106%

Perbandingan capaian Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 3,76 dengan capaian Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2019 belum bisa dihitung karena tidak ada data capaian Indeks Pelayanan Publik baik tahun 2019 maupun 2020.

Capaian Nilai Evaluasi SAKIP pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 81 (A), dengan realisasi kinerja 78,18 (BB) dan capaian kinerja sebesar 97% atau kategori cukup. Pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 81 (A), dengan realisasi kinerja 68,93 (B) dan capaian kinerja sebesar 85,1% atau kategori cukup. Ada kenaikan capaian kinerja Nilai Evaluasi Sakip sebesar 11,9% dari tahun 2019 sebesar 96,6% menjadi 97,3% pada tahun 2020.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public kecamatan pada tahun 2020 ditargetkan 83 dengan realisasi sebesar 88 dan capaian kinerja sebesar 106% atau katagori sangat baik. Sementara pada tahun 2019 ditargetkan 80 dengan realisasi sebesar 87 dan capaian kinerja sebesar 108%. Ada penurunan capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public kecamatan sebesar 2% dari tahun 2019 sebesar 108% menjadi 106% pada tahun 2020.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2020	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	n/a	4,51	n/a
1.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Public yang Efektif dan Akuntabel	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	78,18 (BB)	85 (A)	91,9%
1.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	90	97.7%

Tingkat kemajuan capaian sasaran strategis tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir renstra untuk tujuan peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public belum teridentifikasi sehingga belum bisa dianalisa capaiannya. Sementara tingkat kemajuan sasaran meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang efektif dan akuntabel sebesar 91,9% dan 97,7% pada sasaran meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	n/a	3,25	n/a
1.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Public yang Efektif dan Akuntabel	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	78,18 (BB)	75	95,93%
1.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	81	108,64%

Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel di Kecamatan Larangan dikategorikan cukup baik, sebesar 95,93% apabila disandingkan capaian kinerjanya antara capaian kinerja Kecamatan Larangan, dengan nilai SAKIP 78,18 dengan standart nasional dengan target nilai 75.

Sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan di Kecamatan Larangan juga menunjukkan capaian kinerja dengan predikat sangat baik, sebesar 108,64% jika dilihat dari nilai capaian kinerja di Kecamatan Larangan, 88 dengan nilai standart nasional sebesar 81.

Akan tetapi analisis perbandingan tingkat capaian ini secara menyeluruh belum bisa dianalisis karena Perbandingan capaian kinerja Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik tahun 2020 di Kecamatan Larangan belum teridentifikasi sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan standart nasional dengan ketentuan indeks sebesar 3,25.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,76	n/a	n/a	n/a	n/a
1.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Public yang Efektif dan Akuntabel	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	81 (A)	78,18 (BB)	97%	Refocusing terhadap Pandemi Covid-19 dan Reviu terhadap renja untuk menyesuaikan dengan permendagri 90 tahun 2020	- Kegiatan yang tidak terlaksana dianggarkan tahun berikutnya - Memaksimalkan program prioritas yang mendukung sasaran kinerja
1.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	88	106%	Profesionalisme aparatur dan dukungan partisipasi masyarakat	Kinerja aparatur perlu ditingkatkan

Ada 2 (dua) indikator kinerja utama yang perlu dicermati yaitu Indeks Pelayanan Publik yang belum teridentifikasi sehingga belum bisa memberikan informasi tentang tingkat pencapaiannya dan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP yang masih belum tercapai, hal ini dikarenakan adanya pandemic Covid-19 yang mempengaruhi kinerja sehingga ada beberapa kegiatan/sub kegiatan yang harus di refocusing bahkan ditiadakan dan harus dianggarkan dalam tahun berikutnya. Selain itu juga kewajiban untuk menyesuaikan dengan regulasi yang ada, pelaksanaan pemutakhiran RKPD melalui Permendagri nomor 90 tahun 2019 merupakan factor yang menghambat keberhasilan pencapaian kinerja sehingga kedepannya perlu diadakan penyesuain dokumen SAKIP khususnya rencana kerja diprioritaskan pada peningkatan penyelenggaraan dan pelayanan publik. Dalam hal Indeks Pelayanan Publik, di tahun mendatang perlu diadakan koordinasi lebih intens dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan agar nilai Indeks Pelayanan Publik dapat teridentifikasi lebih awal sehingga tolok ukur pencapaian kinerja akan tergambarkan secara konkrit.

Indeks Kepuasan Masyarakat bisa tercapai berkat profesionalisme aparatur dan dukungan partisipasi masyarakat sehingga perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk masa yang akan datang.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayana n Publik (IPP)	n/a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Prosentas e layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik	100%	Menunjang
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terakomodir	100%	Menunjang
				Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan administrasi Perkantoran yang terakomodir	100%	Menunjang
				Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	• Prosentas e Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	100%	Menunjang
					• Prosentas e PNS Yang Mempunyai Latar	100%	Menunjang

					Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya		
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	100%	Menunjang
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasi onal	Jumlah kendaraan dinas/ope rasional yang dipelihara	100%	Menunjang
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	100%	menunjang
				Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	100%	Menunjang
				Pengadaan Kendaraan Dinas/operasio nal	Jumlah Kendaraa n dinas/ope rasional yang diadakan	0%	Tidak Menunjang
				Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidika n dan pelatihan formal	83%	Tidak Menunjang
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	100%	Menunjang
1.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Public yang Efektif dan Akuntabel	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	97%	Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	• Prosentas e Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	100%	Tidak Menunjang

					• Nilai Sakip	BB	Tidak menunjang
				Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah dokumen sakip yang disusun dengan kualitas baik	100%	Menunjang
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dengan baik	100%	Menunjang
1.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	107%	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum	• Prosentase Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan, dan Pengelolaan Keuangan Desa	100%	menunjang
					• Prosentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Dibina	100%	Menunjang
					• Prosentase Hasil Koordinasi Bidang Keterntan, Ketertiban Umum, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Yang Ditindaklanjuti	100%	Menunjang
				Pembinaan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Jumlah desa melaksanakan Musrembang sesuai administrasi	100%	Menunjang

				Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desanya	100%	Menunjang
				Fasilitas pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah organisasi perempuan dan PKK yang terfasilitasi	100%	Menunjang
				Fasilitas peningkatan kualitas kelestarian lingkungan di wilayah kecamatan	Jumlah wilayah yang terfasilitasi	100%	Menunjang
				Fasilitasi kepemudaan dan olahraga	Jumlah kegiatan kepemudaan dan olahraga yang terfasilitasi	100%	menunjang
				Koordinasi penguatan sistem pemerintahan dan pembangunan di kecamatan	Jumlah koordinasi penguatan sistem pemerintahan dan pembangunan	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Operasional Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional	Jumlah peserta peringatan hari besar keagamaan dan nasional	100%	Menunjang
				Optimalisasi Pemungutan PBB	Jumlah desa yang dioptimalisasi pemungutan PBB	100%	Menunjang
				Pembinaan Posyandu	Jumlah posyandu yang dibina	100%	Menunjang
				Fasilitasi Penanganan Kelancaran Arus Lalu Lintas Pasar	jumlah pasar yang terfasilitasi	100%	Menunjang
				Peningkatan kapasitas dan	Jumlah perangkat desa yang	100%	Menunjang

				profesionalisme perangkat desa	mengikuti peningkatan kapasitas dan profesionalisme		
				Penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah penanganan pengaduan masyarakat yang terselesaikan	100%	Menunjang
				Pelaksanaan Forum Serap Aspirasi/Silaturahmi Kepala Daerah bersama Ulama/Tokoh dan Masyarakat	Jumlah peserta forum rekonsiliasi/konsolidasi/silaturahmi yang dilaksanakan	100%	menunjang
				Pembinaan Remaja Masjid	Jumlah organisasi remaja masjid yang dibangun	100%	Menunjang
				Pelaksanaan Istighosah/Pengajian Bersama Masyarakat	Jumlah Istighosah/pengajian bersama masyarakat yang dilaksanakan	0%	Tidak Menunjang
				Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	• Prosentase pelayanan kecamatan yang sesuai SOP	100%	Menunjang
				Pengembangan dan Operasionalisasi Aplikasi Pelayanan Masyarakat	Jumlah Aplikasi Pelayanan Terpadu yang dikembangkan	100%	Menunjang
				Survey kepuasan masyarakat	Jumlah survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan	100%	Menunjang

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	120.190.000	114.677.200	95,41%
1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15.000.000	11.320.000	75,47%
2	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	105.190.000	103.357.200	98,26%
II	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	84.134.900	76.166.547	90,53%
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.132.500	5.114.500	100%
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional	19.908.900	17.188.747	86,34%
5	Pengadaan peralatan gedung kantor	26.000.000	25.300.000	97,3%
6	Pengadaan meubeleur	7.916.000	7.837.500	99%
7	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	-	-	
8	Pendidikan dan pelatihan formal	18.800.000	14.860.000	79%
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	6.377.500	5.865.800	92%
III	Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	22.000.000	7.345.000	33,4%
10	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	11.000.000	2.050.000	19%
11	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.000.000	5.295.000	48%
IV	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum	154.726.600	154.086.400	99,6%

12	Pembinaan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	14.375.000	14.375.000	100%
13	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	10.130.000	10.130.000	100%
14	Fasilitas pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	15.750.000	15.196.400	96,5%
15	Fasilitas peningkatan kualitas kelestarian lingkungan di wilayah kecamatan	4.194.000	4.188.000	99,85%
16	Fasilitasi kepemudaan dan olahraga	4.550.000	4.550.000	100%
17	Koordinasi penguatan sistem pemerintahan dan pembangunan di kecamatan	4.210.000	4.210.000	100%
18	Koordinasi dan Operasional Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional	1.725.000	1.725.000	100%
19	Optimalisasi Pemungutan PBB	6.568.600	6.488.000	
20	Pembinaan Posyandu	6.735.000	6.735.000	100%
21	Fasilitasi Penanganan Kelancaran Arus Lalu Lintas Pasar	4.885.000	4.885.000	100%
22	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme perangkat desa	4.120.000	4.120.000	100%
23	Penanganan pengaduan masyarakat	3.215.000	3.215.000	100%
24	Pelaksanaan Forum Serap Aspirasi/ Silaturahmi Kepala Daerah bersama Ulama/Tokoh dan Masyarakat	71.034.000	71.034.000	100%
25	Pembinaan Remaja Masjid	3.235.000	3.235.000	100%
26	Pelaksanaan Istighosah/Pengajian Bersama Masyarakat	-		
V	Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	7.272.000	7.262.000	99,86%
27	Pengembangan dan Operasionalisasi Aplikasi Pelayanan Masyarakat	4.020.000	4.020.000	100%
28	Survey kepuasan masyarakat	3.252.000	3.242.000	99,69%

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3,76	n/a	n/a	366.345.500	359.537.147	98%	n/a
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Public yang Efektif dan Akuntabel	81 (A)	78,18 (BB)	97%	204.346.900	198.188.747	97%	100%
1.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	83	88	106%	161.998.600	161.348.400	99,6%	99,6%

Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada, adalah merupakan kinerja yang diharapkan. Kinerja pemerintah daerah akan semakin efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari seratus persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Efisiensi dapat dihitung dengan rumus **Efisiensi = Realisasi Belanja : Target Belanja x 100%**, dengan pengkategorian standart efisiensi kinerja sebagai berikut:

- <60% : Sangart Efisien
- 60% - 80% : Efisien
- 80% - 90% : Cukup Efisien
- 90% - 100% : Kurang Efisien
- >100% : Tidak Efisien

Dari Tabel 3.9 di atas, perbandingan capaian kinerja dengan anggaran tujuan dan sasaran ditunjukkan bahwa tingkat efisiensi di Kecamatan Larangan menunjukkan katagori kurang efisien atau sebesar 100% pada sasaran meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang efektif dan akunrabel, 99,6% pada sasaran meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan. Sementara pada indicator tujuan Kecamatan Larangan belum bisa dilihat tingkat efisiensinya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	83	83	100%	120.190.000	114.677.200	95,41%	4,59%
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	9	75%	15.000.000	11.320.000	75,46%	-0,44%
	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	7	7	100%	105.190.000	103.357.200	98,26%	1,74%
	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	82	82	100%	84.134.900	76.166.547	90,53%	9,47%
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	1	100%	5.132.500	5.114.500	100%	0
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional	1	1	100%	19.908.900	17.188.747	86,34%	3,66 %
	Pengadaan peralatan gedung kantor	5	5	100%	26.000.000	25.300.000	97,3%	2,7%
	Pengadaan meubeleur	8	8	100%	7.916.000	7.837.500	99%	1%

	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	2	0	0%	-	-	-	-
	Pendidikan dan pelatihan formal	6	5	83,3%	18.800.000	14.860.000	79%	4,3%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	1	1	100%	6.377.500	5.865.800	92%	8%
	Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	82	82	100%	22.000.000	7.345.000	33,4%	66,6%
	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	5	5	100%	11.000.000	2.050.000	19%	81%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	100%	11.000.000	5.295.000	48%	52%
	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum	90	90	100%	154.726.600	154.086.400	99,6%	0,4%
	Pembinaan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	1	1	100%	14.375.000	14.375.000	100%	0
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	14	14	100%	10.130.000	10.130.000	100%	0
	Fasilitas pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	14	14	100%	15.750.000	15.196.400	96,5%	3,5%
	Fasilitas peningkatan kualitas kelestarian lingkungan di wilayah kecamatan	14	14	100%	4.194.000	4.188.000	99,85%	0,15%
	Fasilitasi kepemudaan dan olahraga	14	14	100%	4.550.000	4.550.000	100%	0
	Koordinasi penguatan sistem pemerintahan dan	4	4	100%	4.210.000	4.210.000	100%	0

	pembangunan di kecamatan							
	Koordinasi dan Operasional Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional	6	6	100%	1.725.000	1.725.000	100%	0
	Optimalisasi Pemungutan PBB	14	14	100%	6.568.600	6.488.000	98,7%	1,3%
	Pembinaan Posyandu	71	71	100%	6.735.000	6.735.000	100%	0
	Fasilitasi Penanganan Kelancaran Arus Lalu Lintas Pasar	2	2	100%	4.885.000	4.885.000	100%	0
	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme perangkat desa	42	42	100%	4.120.000	4.120.000	100%	0
	Penanganan pengaduan masyarakat	4	4	100%	3.215.000	3.215.000	100%	0
	Pelaksanaan Forum Serap Aspirasi/ Silaturahmi Kepala Daerah bersama Ulama/Tokoh dan Masyarakat	500	500	100%	71.034.000	71.034.000	100%	0
	Pembinaan Remaja Masjid	14	14	100%	3.235.000	3.235.000	100%	0
	Pelaksanaan Istighosah/Pengajian Bersama Masyarakat	1	0		-			-
	Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	87	87	100%	7.272.000	7.262.000	99,86%	0,14%
	Pengembangan dan Operasionalisasi Aplikasi Pelayanan Masyarakat	1	1	100%	4.020.000	4.020.000	100%	0
	Survey kepuasan masyarakat	2	2	100%	3.252.000	3.242.000	99,69%	0,31%

Perbandingan pencapaian kinerja dengan anggaran program dan kegiatan (table 3.10) menunjukkan tingkat efisiensi kinerja di Kecamatan Larangan dikategorikan kurang efisien, hal ini dapat dilihat dari 5 (lima) program yang dilaksanakan hanya 1 (satu) program, yaitu Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan

yang sangat efisien atau sebesar 66,6% yang didalamnya terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu Perencanaan Program Kegiatan dan Pelaporan Kinerja sebesar 81% dan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar 52%. Sementara 24 kegiatan yang tersebar dalam 4 (empat) program dikategorikan kurang efisien.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2020 Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan menetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran dengan 3 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar n/a (belum bisa dikategorikan)
- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 97% (kategori cukup)
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 106% (kategori sangat baik)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam rangka mencapai target kinerja yang

ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 388.323.500,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 359.537.147,-, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 serapan anggaran sebesar 92,6% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 7,41%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, 28 Februari 2021

CAMAT LARANGAN
KABUPATEN PAMEKASAN

A circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN'. The inner circle contains the text 'KECAMATAN LARANGAN'. There is a signature in blue ink over the stamp.
Drs. AGUS BUDI SANTOSO, M.Si

NIP. 19720913 199302 1 002

Pembina Tingkat I



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

KECAMATAN LARANGAN

Jalan Raya Pamekasan Sumenep No.56 Larangan
Pamekasan 69383

KEPUTUSAN CAMAT LARANGAN

Nomor : 188/ 18 /432.508/2020

TENTANG

TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN LARANGAN

- Menimbang** : a. dalam rangka meningkatkan kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Larangan maka perlu dilakukan rencana aksi dan pemenuhan terhadap dokumen-dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk membentuk Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan Keputusan Camat Larangan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia).
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk :
- a. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI);
 - b. Menyusun dan/atau mereview Rencana Strategis (Renstra);
 - c. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
 - d. Menyusun Perjanjian Kinerja;
 - e. Menyusun Pengukuran Kinerja;
 - f. Menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - g. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan;
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Larangan

Pada tanggal : 15 Pebruari 2020


ACHMAD HAMBALI, S.Sos
Pembina Tk I
NIP 19630202 198702 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT LARANGAN
 NOMOR : 188/ 05 /432.509/ 2015
 TENTANG : TIM IMPLEMENTASI SISTEM
 AKUNTABILITAS KINERJA
 INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
 KECAMATAN LARANGAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN LARANGAN**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Camat Larangan
2.	Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
4.	Anggota	1. Kasubbag umum dan Kepegawaian 2. Kasi Pemerintahan 3. Kasi Trantib 4. Kasi PMD 5. Kasi Kesra 6. Unsur Staf Subbag Perencanaan


ACHMAD HAMBALI, S.Sos
 Pembina Tk I
 NIP 19630202 198702 1 003

LAMPIRAN II

LAMPIRAN II: MATRIX RENSTRA KECAMATAN LARANGAN

Tuj uan	Sas ara n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung- jawab	Lokas i
						2019		2020		2021		2022		2023					
						targe t	Rp.	targe t	Rp.	targe t	Rp.	targe t	Rp.	targe t	Rp.	targe t	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				Indeks Pelayanan Publik	n.a	3,51 (B)	1.480.000.000	3,76 (B)	1.525.000.000	4,01	1.960.000.000	4,26	1.655.000.000	4,51	1.745.000.000	4,51	1.745.000.000	Kecamatan Larangan	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Publik yang Efektif dan Akuntabel			Nilai Hasil Evaluasi Sakip	n.a	81,00 (A)	695.000.000	81,00 (A)	735.000.000	81,00 (A)	1.135.000	81,00 (A)	855.000.000	81,00 (A)	870.000.000	81,00 (A)	870.000.000	Kecamatan Larangan	
		3.08.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Persentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik	82%	80%	120.000.000	83%	135.000.000	86%	145.000.000	89%	150.000.000	92%	165.000.000	92%	165.000.000	Kecamatan Larangan	
		3.08.07.01.01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang Terakomodir	8 kali	8 kali	15,000,000	12 kali	15,000,000	12 kali	20,000,000	12 kali	20,000,000	12 kali	25,000,000	12 kali	25,000,000	Sekretariat	Luar Daerah

		3.08.07.01.02	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran yang Terakomodir	7 layanan	7 layanan	105.000.000	7 layanan	120,000.000	7 layanan	125,000.000	7 layanan	130,000.000	7 layanan	140,000.000	7 layanan	140,000.000	Sekretariat	Kabupaten Pamekasan
		3.08.07.02	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur	• Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	78	80%	520.000.000	82%	545.000.000	84%	910.000.000	86%	625.000.000	88%	625.000.000	88%	625.000.000	Kecamatan Larangan	
		3.08.07.02.01	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung kantor Dalam Kondisi Baik	1 Unit	1 Unit	50,000.000	1 Unit	50,000.000	1 Unit	50,000.000	1 Unit	50,000.000	1 Unit	50,000.000	1 Unit	50,000.000	Sekretariat	Kabupaten Pamekasan
		3.08.07.02.02	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Dalam Kondisi Baik	1 Unit	1 Unit	30,000.000	1 Unit	30,000.000	1 Unit	30,000.000	1 Unit	35,000.000	1 Unit	35,000.000	1 Unit	35,000.000	Sekretariat	Kabupaten Pamekasan

		3.08.07.02.04	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	3 item	5 item	45,000,000	5 item	45,000,000	5 item	45,000,000	5 item	45,000,000	5 item	45,000,000	5 item	45,000,000	Sekretariat	Kabupaten Pamekasan
		3.08.07.02.05	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Yang Diadakan	n/a	5 unit	50,000,000	5 unit	50,000,000	5 unit	50,000,000	5 unit	50,000,000	5 unit	50,000,000	5 unit	50,000,000	Sekretariat	Kabupaten Pamekasan
		3.08.07.02.07	Pengadaan mebeleur	Jumlah Peralatan Mebeleur Yang Diadakan	n/a	8 item	75,000,000	8 item	75,000,000	8 item	75,000,000	8 item	75,000,000	8 item	75,000,000	8 item	75,000,000	Sekretariat	Kabupaten Pamekasan
		3.08.07.02.08	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang Diadakan	n/a	1	25.000.000	2 unit	50,000,000	1 unit	350.000.000	2 unit	60.000.000	2 unit	60.000.000	2 unit	60.000.000	Sekretariat	Kabupaten Pamekasan
		3.08.07.02.14	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	185,000,000	1 Unit	185,000,000	1 Unit	250,000,000	1 Unit	250,000,000	1 Unit	250,000,000	1 Unit	250,000,000	Sekretariat	Kabupaten Pamekasan
		3.08.07.02.22	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	n/a	6 orang	40,000,000	6 orang	40,000,000	6 orang	40,000,000	6 orang	40,000,000	6 orang	40,000,000	6 orang	40,000,000	Sekretariat	Luar Daerah
		3.08.07.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah dinas	Jumlah Rumah Dinas Dalam Kondisi Baik	1 Unit	1 Unit	20.000,000	1 Unit	20.000,000	1 Unit	20.000,000	1 Unit	20.000,000	1 Unit	20.000,000	1 Unit	20.000,000	Sekretariat	Kabupaten Pamekasan

		3.08.07.03	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan.	• Persentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	100%	80%	55.000.000	82%	55.000.000	84%	80.000.000	86%	80.000.000	88%	80.000.000	88%	80.000.000		
				Nilai Sakip	BB	A		A		A		A		A		A			
		3.08.07.03.01	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen sakip yang disusun dengan kualitas baik	5 Dokumen	5 Dokumen	30,000,000	5 Dokumen	30,000,000	5 Dokumen	30,000,000	5 dokumen	30,000,000	5 dokumen	30,000,000	5 dokumen	30,000,000	Sekretariat	Kecamatan Larangan
		3.08.07.03.02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun Dengan Kualitas Baik	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	Sekretariat	Kecamatan Larangan
		3.08.07.03.03	Kegiatan Pengumpulan/Updating Data Kebutuhan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Data Kebutuhan Perencanaan Yang Disusun	-	-	-	-	-	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	Sekretariat	Kecamatan Larangan
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	n.a	75	860.000.000	83	790.000.000	85	825.000.000	87	800.000.000	90	875.000.000	90	875.000.000	Kecamatan Larangan	

		3.08.07.08	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum	Prosentase Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Dengan Kualitas Baik	n.a	90%	785.000.000	90%	715.000.000	90%	750.000.000	100%	725.000.000	100%	800.000.000	100%	800.000.000	Kecamatan Larangan	
				Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	n.a	70%		70%		80%		83%		85%		85%			
				Prosentase Sengketa Masyarakat Yang Tertangani	n.a	70%		70%		80%		83%		85%		85%			
		3.08.07.08.01	Pembinaan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Jumlah Musrenbang Kecamatan yang Dilaksanakan	1 kali	1 kali	15.000.000	1 kali	20,000,000	1 kali	20,000,000	1 kali	20,000,000	1 kali	25,000,000	1 kali	25,000,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Larangan
		3.08.07.08.02	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	14 Desa	14 Desa	50,000,000	14 Desa	50,000,000	14 Desa	50,000,000	14 Desa	50,000,000	14 Desa	50,000,000	14 Desa	50,000,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Larangan

		3.08.07.08.03	Fasilitas pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Organisasi Perempuan Dan PKK yang Terfasilitasi	14 Organisasi	14 Organisasi	50.000.000	14 Organisasi	50.000.000	14 Organisasi	50.000.000	14 Organisasi	50.000.000	14 Organisasi	50.000.000	14 Organisasi	50.000.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Laran gan
		3.08.07.08.04	Fasilitas peningkatan kualitas kelestarian lingkungan di wilayah kecamatan	Jumlah desa/kel yang terfasilitasi	14 desa/kel	14 desa/kel	45,000,000	14 desa/kel	45,000,000	14 desa/kel	45,000,000	14 desa/kel	45,000,000	14 desa/kel	45,000,000	14 desa/kel	45,000,000	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Laran gan
		3.08.07.08.05	Fasilitasi Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga Yang Terfasilitasi	14 organisasi	14 organisasi	45.000.000	14 organisasi	45.000.000	14 organisasi	45.000.000	14 organisasi	45.000.000	14 organisasi	45.000.000	14 organisasi	45.000.000	Seksi Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Laran gan
		3.08.07.08.06	Koordinasi penguatan system pemerintahan dan pembangunan di kecamatan	Jumlah koordinasi penguatan system pemerintahan dan pembangunan di kecamatan	n/a	4 koord inasi	40.000.000	4 koord inasi	40.000.000	4 koord inasi	40.000.000	4 koord inasi	40.000.000	4 koord inasi	40.000.000	4 koord inasi	40.000.000	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Laran gan
		3.08.07.08.08	Koordinasi dan Operasional Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional	Jumlah Hari Besar Keagamaan Dan Hari Besar Nasional Yang Dikoordinasikan	6 Hari Besar	6 Hari Besar	30,000,000	6 Hari Besar	30,000,000	6 Hari Besar	40,000,000	6 Hari Besar	40,000,000	6 Hari Besar	50,000,000	6 Hari Besar	50,000,000	Seksi Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Laran gan

		3.08.07.08.10	Monitoring pengendalian keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilu	Jumlah Pemilu Yang Dilaksanakan	2 Pemilu	2 Pemilu	50,000,000	-	-	-	-	-	2 Pemilu	60,000,000	2 Pemilu	60,000,000	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Laran gan
		3.08.07.08.47	Optimalisasi Pemungutan PBB	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Terfasilitasi	14 Desa/Kel	14 Desa/Kel	30,000,000	14 Desa/Kel	30,000,000	14 Desa/Kel	30,000,000	14 Desa/Kel	30,000,000	14 Desa/Kel	30,000,000	30,000,000	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Laran gan
		3.08.07.08.48	Pembinaan Posyandu	Jumlah Posyandu Yang Dibina	71 Posyan du	71 Posya ndu	50,000,000	71 Posya ndu	50,000,000	71 Posya ndu	50,000,000	71 Posya ndu	50,000,000	71 Posya ndu	50,000,000	50,000,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Laran gan
		3.08.07.08.50	Koordinasi dan Monitoring Pengendalian Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pilkades Yang Dilaksanakan	n/a	7 Desa	25,000,000	-	-	7 Desa	25,000,000	-	-	-	-	-	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Laran gan
		3.08.07.08.60	Penanganan Sengketa Masyarakat	Jumlah penyelesaian Pengaduan yang tertangani dengan baik	3 penga duan	4 penga duan	20,000,000	4 penga duan	20,000,000	4 penga duan	20,000,000	4 penga duan	20,000,000	4 penga duan	20,000,000	20,000,000	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Laran gan
		3.08.07.08.61	Fasilitasi Penanganan Kelancaran Arus Lalu Lintas Pasar	Jumlah Pasar Yang Terfasilitasi	1 Pasar	2 Pasar	20.000.000	2 Pasar	20.000.000	2 Pasar	20.000.000	2 Pasar	20.000.000	2 Pasar	20.000.000	20.000.000	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Laran gan

		3.08.07.08.86	Peningkatan Profesionalisme Perangkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Aparatur Desa yang Terfasilitasi	n/a	42 aparat	50.000.000	42 aparat	50.000.000	42 aparat	50.000.000	42 aparat	50.000.000	42 aparat	50.000.000	42 aparat	50.000.000	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Langan
		3.08.07.08.87	Peningkatan Kapasitas Karang Taruna	Jumlah organisasi karang taruna	n/a	7 organisasi	50.000.000	7 organisasi	50.000.000	7 organisasi	50.000.000	7 organisasi	50.000.000	7 organisasi	50.000.000	7 organisasi	50.000.000	Seksi Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Langan
		3.08.07.08.88	Pelaksanaan Forum Serap Aspirasi/Silaturahmi Kepala Daerah bersama Ulama / Tokoh dan Masyarakat	Jumlah forum rekonsiliasi/konsolidasi/silaturahmi yang dilaksanakan	n/a	2 kali	100,000,000	2 kali	100,000,000	2 kali	100,000,000	2 kali	100,000,000	2 kali	100,000,000	2 kali	100,000,000	Seksi Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Langan
		3.08.07.08.89	Pembinaan Desa Siaga	Jumlah desa yang dibina	n/a	7 desa	25.000.000	7 desa	25.000.000	7 desa	25.000.000	7 desa	25.000.000	7 desa	25.000.000	7 desa	25.000.000	Seksi Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Langan
		3.08.07.08.90	Pembinaan Remaja Masjid	Jumlah organisasi Remaja Masjid yang dibina	n/a	14 organisasi	20.000.000	14 organisasi	20.000.000	14 organisasi	20.000.000	14 organisasi	20.000.000	14 organisasi	20.000.000	14 organisasi	20.000.000	Seksi Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Langan

		3.08.07.08.102	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang Dilaksanakan	n/a	4 kali	20.000.000	4 Kali	20,000,000	4 Kali	20,000,000	4 Kali	20,000,000	4 Kali	20,000,000	4 Kali	20,000,000	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Laran gan
		3.08.07.08.109	Pelaksanaan Istighasah/pengajian Kepala Daerah Bersama Masyarakat	Jumlah Pengajian Bersama Yang Dilaksanakan	n/a	1 kali	50,000,000	1 kali	50,000,000	1 kali	50,000,000	1 kali	50,000,000	1 kali	50,000,000	1 kali	50,000,000	Seksi Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Laran gan
		3.08.07.09	Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	Prosentase pelayanan kecamatan yang sesuai SOP	n/a	82%	75.000.000	84%	75.000.000	87%	75.000.000	90%	75.000.000	91%	75.000.000	92%	75.000.000		
		3.08.07.09.01	Pengembangan dan Operasionalisasi Aplikasi Pelayanan Masyarakat	Jumlah Aplikasi Pelayanan Terpadu Yang Dikembangkan	n/a	1 Aplikasi	50,000,000	1 Aplikasi	50,000,000	1 Aplikasi	50,000,000	1 Aplikasi	50,000,000	1 Aplikasi	50,000,000	1 Aplikasi	50,000,000	Seksi Pelayanan	Kecamatan Laran gan
		3.08.07.09.02	Survey kepuasan masyarakat	Jumlah dokumen skm yang disusun	n/a	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,000,000	Seksi Pelayanan	Kecamatan Laran gan

LAMPIRAN III



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN **KECAMATAN LARANGAN**

Jalan Raya Pamekasan - Sumenep No. 56 Larangan
Pamekasan 69383

**KEPUTUSAN
CAMAT LARANGAN
KABUPATEN PAMEKASAN**
NOMOR : 188/03/432.508/2020

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN LARANGAN
KABUPATEN PAMEKASAN**

**CAMAT LARANGAN
KABUPATEN PAMEKASAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Larangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
 4. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** :
- Keputusan Camat Larangan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 30 Januari 2020


CAMAT LARANGAN
KECAMATAN LARANGAN
ACHMAD HAMBALI, S.Sos
Pembina Tk I
NIP 19630202 198702 1 003

Lampiran I : Keputusan Camat Larangan
 Nomor : 188/03/432.508/2020
 Tanggal : 30 Januari 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan																															
				Alasan	Formulasi																														
1.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	Permenpan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Range Nilai : <table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr><tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr></table> Nilai F01+F02+F03 ----- x Bobot per indikator 3	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
Range Nilai	Kategori	Makna																																	
0 – 1,00	F	Gagal																																	
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																																	
1,51 – 2,00	D	Buruk																																	
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)																																	
2,51 – 3,00	C	Cukup																																	
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)																																	
3,51 – 4,00	B	Baik																																	
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik																																	
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																																	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	
				Alasan	Formulasi
					- Nilai per aspek = ΣNilai per indikator - Nilai Indeks = $\Sigma(\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$
1.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan setiap tahunnya 1. AA >90 -100 Sangat Memuaskan; 2. A >80 – 90 Memuaskan; 3. BB >70 – 80 Sangat Baik; 4. B >60 – 70 Baik; 5. CC >50 – 60 Cukup (Memadai); 6. C >30 - 50 Kurang; 7. D 0 - 30 Sangat Kurang.
1.2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (IKM)	Nilai	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Berdasarkan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK), MUTU PELAYANAN, dan KINERJA UNIT PELAYANAN sebagai berikut : 1. 25,00 – 64,99 D (Tidak baik); 2. 65,00 – 76,60 C (Kurang baik); 3. 76,61 – 88,30 B (Baik); 4. 88,31 – 100,00 A (Sangat baik). - Total Nilai Persepsi Per Unsur - ----- x Nilai perimbang - Total Unsur yang Terisi IKM Unit Pelayanan x 25


CAMAT LARANGAN
 ACHMAD HAMBALI, S.Sos
 Pembina Tk I
 NIP 19630202 198702 1 003

LAMPIRAN IV



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. AGUS BUDI SANTOSO, M.Si

Jabatan : Camat Larangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. BADDRUT TAMAM, S.Psi

Jabatan : Bupati Pamekasan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamekasan, April 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. BADDRUT TAMAM, S.Psi

Drs. AGUS BUDI SANTOSO, M.Si

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KECAMATAN LARANGAN
KABUPATEN PAMEKASAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,76
1.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Public yang Efektif dan Akuntabel	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	81(A)
1.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 113.000.000,00	
2.	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur	Rp 36.093.400,00	
3.	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan.	Rp 9.891.000,00	
4.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum	Rp 203.067.000,00	
5.	Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	Rp 7.272.000,00	
	Jumlah	Rp 369.323.400,00	

Pamekasan, April 2020

Pihak Kedua,
BUPATI PAMEKASAN

Pihak Pertama,
CAMAT LARANGAN



H. BADDRUT TAMAM, S.Psi

Drs. AGUS BUDI SANTOSO, M.Si



Print of
Kecamatan Larangan 2021